

BAB I

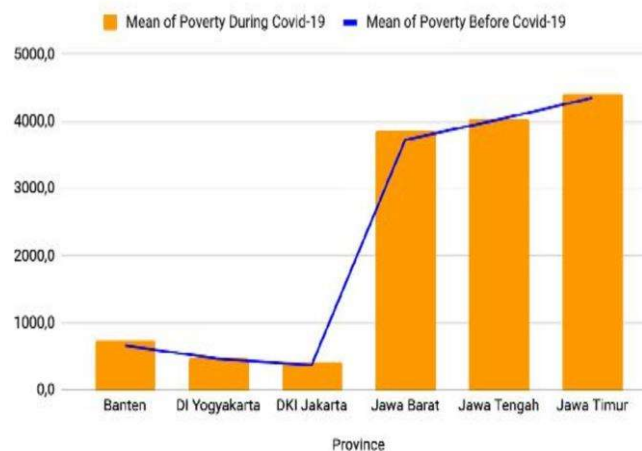
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, terutama di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan turut berdampak pada aspek sosial dan juga politik. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu diprioritaskan dalam rangka program pembangunan ekonomi (Syahputri & Fisabilillah, 2023). Kemiskinan juga menjadi isu individual di mana seseorang kesulitan mencukupi kebutuhan dasarnya. Ini disebabkan oleh beragam faktor, meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, serta pertumbuhan populasi yang serta-merta menambah persaingan dalam berbagai sektor, termasuk dalam hal mencari pekerjaan (Sari, 2021). Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 11,98 juta orang, bertambah sebanyak 0,16 juta orang dari 11,82 juta pada Maret 2022.

Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan upah minimum (Kuncoro, 2013). Penentuan upah minimum didasarkan pada dua faktor utama kebutuhan hidup masyarakat yang diikuti kemampuan perusahaan untuk berkembang serta mempertahankan bisnisnya (Abdullah & Hasbiullah, 2023). Pengurangan

kemiskinan berkaitan dengan faktor lain seperti peningkatan integrasi. Di setiap daerah tertentu karena pendapatan di setiap daerah di Indonesia berbeda tetapi rendahnya tingkat upah minimum tidak selalu mencerminkan kondisi keseluruhan ekonomi di suatu daerah, karena akan banyak faktor yang menyangkut kemiskinan yang juga perlu dipertimbangkan. Dalam strategi Pembangunan daerah, pengurangan angka kemiskinan ialah target utama yang efektivitasnya menjadi tolak ukur keberhasilan (Sari, 2021).

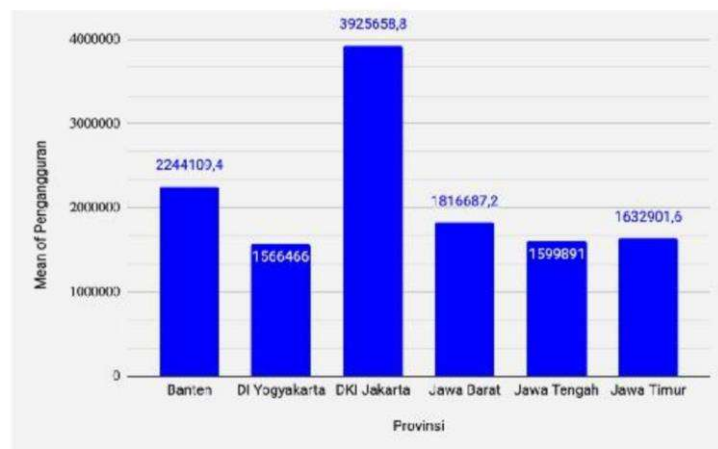


Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa Tahun 2015 sampai 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di pulau Jawa, sebelum dan juga selama penyebabnya dari pandemi Covid-19 Indonesia dengan rentang waktu 2015-2021. Umumnya, keadaan di tiap provinsi Pulau Jawa baik sebelum maupun sesudah adanya Covid-19 tidak serta-merta mengubah peringkat yang ada, melainkan memperlihatkan keberadaan nilai rata-rata yang bertambah

(Dakhilullah, 2023). Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian, termasuk peningkatan pengangguran. Di negara-negara berkembang, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menggambarkan sebagian dari persoalan ketenagakerjaan yang ada. Ketika seseorang tidak mempunyai pekerjaan, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka secara memadai. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada naiknya angka kemiskinan secara keseluruhan.



Gambar 1. 2 Grafik Upah Minimum di Pulau Jawa Tahun 2013 sampai 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Kuncoro (2013) menjelaskan kemiskinan muncul akibat perbedaan upah minimum dimasing-masing wilayah tertentu dikarenakan pendapatan tiap daerah di Indonesia berbeda, tetapi rendahnya tingkat upah minimum tidak selalu mencerminkan kondisi keseluruhan ekonomi di suatu daerah, karena banyak faktor yang menyangkut kemiskinan juga perlu dipertimbangkan. Pada Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata

perkembangan upah minimum provinsi yang ada di Pulau Jawa pada 2017-2021. Rata-rata UMP Jakarta pada periode tersebut yakni (Rp. 3925658,8), Banten (Rp. 2244109,4), disusul Jawa Barat (Rp. 1816687,2), kemudian Jawa Timur (Rp. 1632901,6), lalu Jawa Tengah (Rp. 1599891) serta Yogyakarta yang termasuk upah minimum terendah sekitar (Rp. 1566466).

Pada Gambar 1.2 upah minimum paling tinggi adalah Provinsi Jakarta, dimana Jakarta sebagai ibukota dan pusat keuangan Indonesia searah dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung cepat, tentunya ini turut mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja dan memicu kenaikan upah minimum. Sebagai akibatnya bisa menyebabkan berkurangnya kemiskinan, meningkatkan daya beli untuk mendorong konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun terdapat faktor pemicu yang muncul seperti inflasi, dikarenakan kenaikan upah minimum dapat memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Terdapat sejumlah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dikarenakan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang berfokus terhadap peningkatan kualitas dari SDM, sehingga upah yang didapat oleh para pekerja menjadi layak, diiringi dengan kualitas para pekerja yang semakin meningkat. Masalah pengangguran menjadi satu isu ketenagakerjaan yang terdapat di Jawa Barat, dengan upah minimum yang besar terdapat faktor eksternal seperti tingginya biaya hidup, timpangnya akses pendidikan, urbanisasi dan kurangnya akses layanan publik, sehingga wilayah tersebut menjadi daerah yang

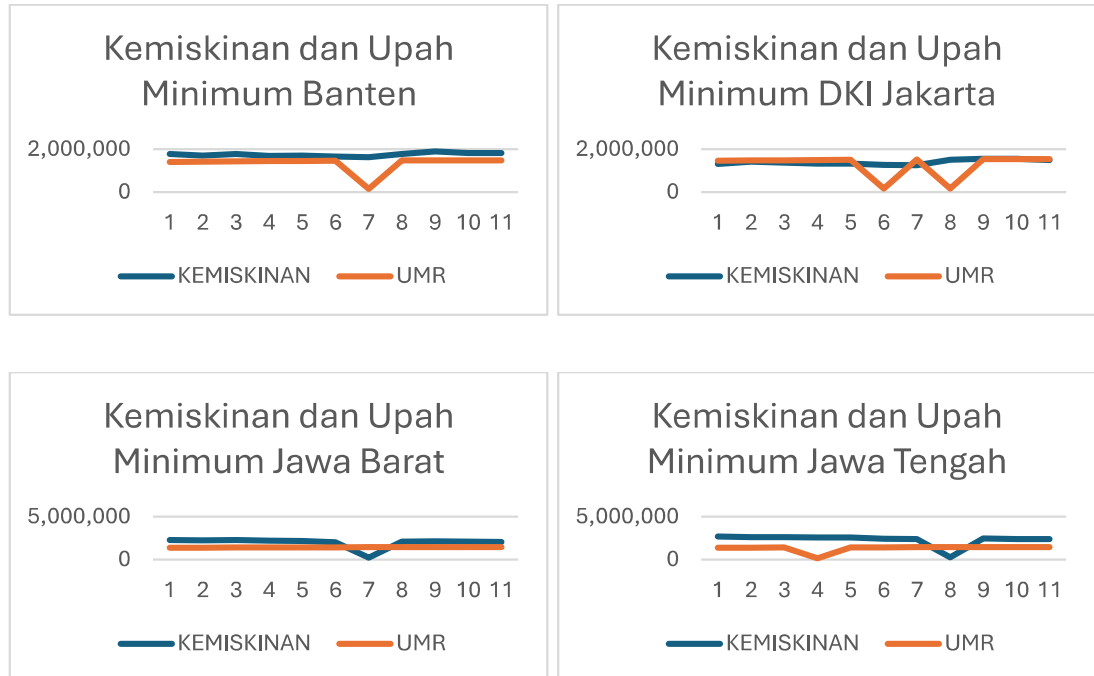
memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan diperlukan pemberdayaan terhadap tenaga kerja dan perekonomian masyarakat (Nugraha, 2023). Kolaborasi peran pemerintah dan sektor swasta untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Barat dapat dilakukan dengan beberapa cara, adanya pengembangan infrastruktur, pemberdayaan pertanian dan UMKM, program pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses layanan kesehatan. Provinsi Yogyakarta adalah salah satu wilayah yang memiliki upah minimum terendah di Indonesia (World Bank, 2023), sejalan dengan potensi ekonomi pariwisatanya yang berkembang dikarenakan biaya hidup yang cukup murah beriringan dengan munculnya struktur pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan peningkatan minat pekerja yang kreatif agar bisa memotivasi perusahaan guna membayar upah yang lebih kompetitif. Berbeda dengan keadaan daerah yang ada di Jakarta, dikarenakan adanya ketimpangan pendapatan antar perkotaan atau pedesaan maka strategi pemerintah harus dilakukan guna membangun pembangunan yang merata dengan peningkatan infrastruktur desa, dengan dilakukan pengawasan dan perhatian yang diberikan pemerintah, peningkatan pemerataan pendapatan dapat meningkat pula. Kemiskinan terus menjadi isu ekonomi yang kompleks di setiap negara sedang berkembang seperti Indonesia (Prayoga dkk. 2022)

Ulhafiah & Arianti (2023) menjelaskan bahwa upah minimum dengan standar gaji yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja karena besaran upah dapat berdampak pada produktivitas pekerja yang diharapkan turut menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan juga jasa, mengurangi kesenjangan pendapatan,

dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur diikuti Yogyakarta. Masing-masing provinsi memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Meskipun Provinsi Banten dan Jakarta memiliki tingkat upah yang tinggi terdapat faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka (Bank Indonesia, 2021), dikarenakan kurangnya akses terhadap pendidikan disertai program peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan permintaan di dunia kerja yang berkualitas serta faktor lain yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar kota dan desa di Jakarta, yang merupakan kota padat penduduk dan banyak SDM yang belum banyak mendapatkan pendidikan maupun pelatihan. Kemiskinan terus menjadi isu ekonomi yang kompleks di setiap negara sedang berkembang seperti Indonesia (Prayoga dkk., 2022)

Pada penelitian oleh Adi Lutfi & Putra (2021) menyatakan tingginya pertumbuhan ekonomi diartikan taraf hidupnya tinggi pula, mengacu pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut temuan Faizin (2021), penetapan upah minimum sebaiknya mempertimbangkan dua aspek utama: penilaian kebutuhan hidup layak serta tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Safitri et al (2022) menekankan bahwa nilai PDRB sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan juga efisiensi faktor-faktor produksi. Dengan menyediakan

kesempatan kerja yang memadai dan efektif, pemerintah dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan selaras dengan penelitian K. R. Syahputri & Fisabilillah (2023) yang mengungkapkan pengangguran terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau tidak berhasil mendapat pekerjaan. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan, yang serta-merta berdampak negative terhadap kesejahteraan individu tersebut. Sejalan dengan temuan, Anggoro (2023) berpendapat terkait urgensi investasi di bidang pendidikan. Menurutnya, peningkatan pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan akan berkontribusi pada penambahan kualitas SDM secara keseluruhan. Berikut grafik dari kemiskinan dan upah minimum dari provinsi di Pulau Jawa.





Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Upah Minimum 2012-2022

Pada provinsi potensial di Indonesia seperti Banten dan Jakarta memiliki upah minimum yang lebih tinggi dari provinsi lain terutama Jakarta dengan wilayah infrastruktur dan pemerintahan Indonesia terletak di DKI Jakarta serta upah minimum yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan termasuk provinsi Banten dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, meskipun faktor lain yang berperan pada naik turunnya kemiskinan yaitu lapangan kerja dan inflasi. Jawa barat, ada kenaikan upah minimum juga diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin, dalam situasi ini pekerja di sektor formal yang umumnya dilindungi oleh regulasi UMK cenderung menikmati kenaikan upah yang memadai. Sementara itu, pekerja di sektor informal seperti halnya pedagang kaki lima ataupun pekerja harian mungkin tidak mengalami penambahan pendapatan yang setara (Maulana & Desmawan, 2023). Tingginya Upah Minimum di Jawa Barat belum tentu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan jika berbagai faktor tidak ditangani secara efektif, untuk mengurangi penurunan kemiskinan termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta perlu adanya pandangan keseluruhan (*holistic*) yang tidak hanya fokus pada upah minimum tetapi pada

peningkatan pendidikan, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara tingkat upah minimum yang tinggi dengan kualitas sumber daya masyarakat di berbagai daerah. Meskipun tingkat upah minimum yang tinggi diasumsikan dapat meningkatkan kesejahteraan, penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu terjadi, mengingat adanya perbedaan dari karakteristik daerah. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja yang berkualitas akan memotivasi bertambahnya PDRB yang kemudian bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (Mukaromah dkk., 2023). Penelitian diharapkan dapat memberi perspektif yang komprehensif mengenai urgensi desain kebijakan yang holistic dan terintegrasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?

4. Bagaimana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
4. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
5. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan di Pulau Jawa

D. Manfaat Penelitian

- a) Memberikan kontribusi wawasan mengenai bagaimana sektor makro ekonomi memberikan pengaruh faktor ekonomi pada kesejahteraan masyarakat di provinsi yang ada di Indonesia yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta selama 2013-2022.

- b) Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan pada sektor kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana dapat memberikan pengaruh terhadap sektor makro ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi terkait.
- c) Menjadi salah satu rujukan untuk penelitian berikutnya mengenai topik yang serupa.